



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I PUTU ASTARIKA
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 880156

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.650.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	222.550.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 173.000.000		
2. MOTOR, SUZUKI ADDRESS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
3. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z1 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.800.000		
4. MOTOR, YAMAHA NMAX TURBO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 38.250.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	120.715.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	9.093.800
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	269.690.973
F. HARTA LAINNYA	Rp.	61.804.990
Sub Total	Rp.	2.333.854.763
III. HUTANG	Rp.	8.913.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.324.941.763

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.